

POLITIK DAN DAKWAH ISLAM :
Studi Prilaku Memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh



LAPORAN PENELITIAN

PENELITIAN KELOMPOK

OLEH

Dr. Hasrinal
Drs. Anas Harun, M.Si
Dr. Hadi Candra
Drs. M. Karim, M.Pd.I
Jafar Ahmad, M.Si.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KERINCI
TAHUN 2015

LAPORAN AKHIR

1. Penelitian

Judul Karya Ilmiah : POLITIK DAN DAKWAH ISLAM:
Studi Prilaku Memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota
Sungai Penuh.

- a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu : Ilmu Sosial dan Da'wah
- b. Jenis Penelitian : *Mixed Method* (Metode Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif)
- c. Kategori : Kelompok

2. Pelaksana Penelitian

- a. Dr. Hasrinal Lektor Kepala/ IV/a
- b. Drs. Anas Harun Lektor Kepala/ IV/a
- c. Dr. Hadi Candra Lektor Kepala/ III/ d
- d. Drs. M. Karim, M.Pd.I Lektor Kepala/ IV/a
- e. Jafar Ahmad, M.Si. Lektor/ III/b

Jangka Waktu Penelitian : 90 (Sembilan Puluh) Hari

- 3. Biaya yang diperlukan : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Sungai Penuh, 19 Agustus 2015

Pelaksana Penelitian

Ketua

Mengetahui,

Kepala P3M STAIN KERINCI

Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag.

NIP. 197005051998031006

Jafar Ahmad, M.Si.

NIP. 197801212011011006



Mengetahui,
KETUA STAIN Kerinci

Dr. Sonahst, M.Ag.

NIP. 196306021999903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kapten Muradi Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

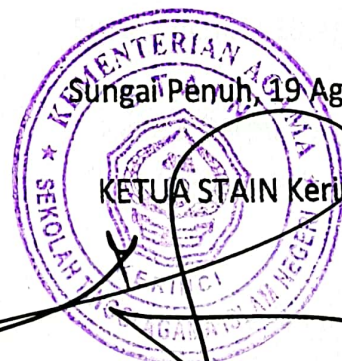
**SAMBUTAN
KETUA STAIN KERINCI**

Puji syukur diucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam diucapkan pula untuk nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia yang hasil nyatanya bisa kita rasakan sampai hari ini.

Sebagai salah satu usaha dalam rangka menambah bahan bacaan pada hasil penelitian Perpustakaan STAIN Kerinci adalah dengan memperbanyak dan membukukan hasil Penelitian berjudul "POLITIK DAN DAKWAH ISLAM: Studi Prilaku Memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh" yang ditulis oleh Jafar Ahmad, M.Si. dkk. Dipandang perlu untuk diperbanyak dan dibukukan. Mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang menekuni bidang ilmu social dan da'wah. Hasil penelitian ini diharapkan juga berkontribusi pada pembaca umum yang memiliki ketertarikan pada bidang yang penelitian ini.

Dengan diperbanyak dan dibukukan karya ilmiah ini, kam ucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis dan semua pihak yang terlibat dalam hal ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berdo'a semoga apa yang kita usahakan ini menjadi amal sholeh.



Sungai Penuh, 19 Agustus 2015

KETUA STAIN Kerinci

Dr. Y. Sonafist, M.Ag.

NIP. 196306021999903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI**

Jl. Kapten Muradi Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

SURAT KETERANGAN

No. Stl.10/1/KP.00/ /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan STAIN Kerinci dengan ini menerangkan bahwa:

Judul Karya Ilmiah : POLITIK DAN DAKWAH ISLAM:
Studi Prilaku Memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota
Sungai Penuh.

Ditulis oleh :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Drs. Anas Harun | Lektor Kepala/ IV/a |
| b. Dr. Hasrinal | Lektor Kepala/ IV/a |
| c. Dr. Hadi Candra | Lektor Kepala/ III/ d |
| d. Drs. M. Karim, M.Pd.I | Lektor Kepala/ IV/a |
| e. Jafar Ahmad, M.Si. | Lektor/ III/b |

Karya Ilmiah tersebut telah dibukukan dan terdaftar pada Perpustakaan STAIN Kerinci sebagai bahan bacaan .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 19 Agustus 2015

Kepala Perpustakaan
STAIN Kerinci

Drs. Sabki

NIP. 196410242002121001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah swt. Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “*POLITIK DAN DAKWAH ISLAM: Studi Prilaku Memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh*”. Penelitian ini merupakan tugas dalam rangka menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan bagian tugas pokok dosen. Penelitian ini dibiayai oleh bantuan DIPA STAIN Kerinci tahun anggaran 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan rampung sesuai target yang diinginkan tanpa *bantuan* dan andil berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materil. Untuk itu, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Direktorat jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci
4. Kepala P3M STAIN Kerinci
5. Kepala Perpustakaan STAIN Kerinci

Semoga *semua* bantuan yang telah diberikan itu, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah swt. Amin

Sungai Penuh, 19 Agustus 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

Identitas dan Pengesahan Laporan Akhir	i
Sambutan Ketua STAIN Kerinci	ii
Surat Keterangan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	13
BAB II POLITIK DAN ISLAM	25
A. Kedudukan Politik dalam Islam	25
B. Peran Politik dalam Da'wah	26
C. Karakteristik Politisi Da'wah	29
D. Langkah-langkah Menjadi Politisi Da'wah	32
BAB III KONDISI SOSIAL DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	35
B. Pemekaran Kota Sungai Penuh	38
C. Pelaksanaan Otonomi Daerah Sungai Penuh Pasca Pemekaran	40

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Prilaku Memilih Warga Kerinci dan Kota Sungai Penuh	42
	B. Temuan dan Pembahasan Penelitian	71
BAB V	PENUTUP	74
	C. Kesimpulan	74
	D. Rekomendasi	75

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa Reformasi sebagai penanda runtuhnya kekuasaan Soeharto yang dibangun selama 32 tahun pada tahun 1998 dalam waktu bersamaan juga menandakan runtuhnya sistem politik otoriter yang terbangun melalui usaha sadar dalam rentang waktu 1966 – 1998 tersebut. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan beberapa konsekuensi turunan bagi sistem pemerintahan, misalnya krisis kepercayaan kepada lembaga politik, penyelenggara negara, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Runtuhnya rezim Soeharto juga membawa perubahan mendasar lainnya dalam sistem politik Indonesia. Tekanan publik terhadap pemerintah otoriter yang dipraktikkan Soeharto pada masa akhir kepemimpinannya, yakni sekitar tahun 1997 akhir, menunjukkan pergerakan yang cukup besar. Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam lembaga kemahasiswaan, organisasi masyarakat, intelektual, dan media massa secara bersama-sama meminta Soeharto mundur dari kursi kekuasaan. Dalam perkembangannya kemudian, Soeharto memilih mundur dari kursi presiden, meletakkan jabatannya. Sistem otoriter itu pun berangsur berubah menuju sistem politik transisional.¹

Sejauh ini, era dimaksud disebut sebagai Era Reformasi yang dimulai dengan kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 tersebut, ditandai dengan kebebasan untuk bersikap dan mengemukakan pendapat secara terbuka, termasuk dalam hal mendirikan partai politik.² Usaha Pemerintah Orde Baru menegakkan dominasi politik dengan berbagai upaya tidak bisa lagi menopang kekuasaan. Selama 32 tahun Orde Baru telah membangun persepsi, kesadaran, dan penerimaan publik akan rezim yang ada. Pemerintah Orde Baru telah membentuk persepsi dengan pembentukan opini melalui aneka institusi dengan mekanisme kekerasan simbolik berupa aneka bentuk kekuasaan.³

¹Masa politik transisi ini, paling tidak masih berlangsung sampai cukup lama. Bahkan sampai tahun 2006, ketika Valina Singka menulis disertasi tentang Perubahan Undang-undang pada Masa Transisi, terma transisi masih digunakan. Lihat Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hal. 17

² Baharudin Jusuf Habibie, *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2005, hal. 103-145

³ Lihat Yasar Amir Piliang (kata pengantar) dalam Arief Adityawan S, *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia: Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2008, hal. xxiii. Penjelasan mengenai kondisi perekonomian Indonesia kala itu bisa dilihat pada website Bappenas www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9663/1792/diakses pada 09 Desember 2014

Sebagai usaha untuk lepas dari tradisi pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik, pada tahun 2004, melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Masa reformasi, selain ditandai dengan mulai munculnya keberanian dalam mengeluarkan pendapat berbeda terhadap pemerintah, juga di sisi lain memunculkan upaya untuk menemukan pemimpin daerah yang berasal dari kalangan internal daerah itu sendiri. Maksudnya, seorang kepala daerah seperti gubernur dan bupati harusnya dari penduduk asli. Masing-masing daerah mulai memikirkan dengan serius siapa saja yang pantas menjadi pemimpin di daerah mereka.

Gerry Van Klinken, seorang periset yang banyak meneliti di Indonesia, Australia, dan Belanda, yang tulisan mutakhirnya tentang konflik etnis yang terjadi di luar Jawa pasca-Orde Baru, menyebutkan dalam salah satu artikelnya *Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal*, bahwa telah terjadi peningkatan keterlibatan etnik lokal untuk kembali muncul sebagai simbol etnik yang pernah berkuasa di wilayahnya dulu. Maka bermunculanlah keturunan para raja/ sultan, mulai dari Sumatera sampai Maluku. Masa transisi ini ditandai dengan pemberian hak kepada daerah untuk lebih leluasa dalam mengambil kebijakan dibandingkan dengan era Orde Baru. Upaya kembalinya elit lokal untuk menguasai wilayahnya bisa ditemukan di Sulawesi Tengah, Sumba Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.⁴

Dari penelitian pada era reformasi kelihatan ada upaya yang sangat kuat dari masing-masing tokoh masyarakat daerah untuk mendapatkan pemimpin dari lingkungan sosial dan etnik mereka sendiri. Upaya untuk mengembalikan identitas etnik terlihat jelas di beberapa daerah, misalnya muncul lagi beberapa tokoh yang diakui/ mengaku sebagai keturunan raja atau sultan pada beberapa daerah. Hal ini juga berlaku dalam pemilihan umum yang memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Nilai-nilai primordialisme muncul dan terlihat begitu nyata dalam proses politik yang berlangsung sepanjang masa reformasi sampai hari ini. Dalam Perspektif Pierre Felix Bourdieu, sosiolog Prancis, menyebutkan bahwa setiap kelompok, dalam hal ini

⁴ Beberapa artikel hasil penelitian yang tergabung dalam buku Henk Sculte Nordholt Gerry van Klinken (editor), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, menunjukkan bahwa upaya kelompok etnik pada masing-masing daerah untuk berkuasa ditunjukkan dengan nyata dan terbuka, tanpa rasa khawatir seperti pada Era Orde Baru.

etnik, pasti memiliki upaya untuk mempertahankan kepentingan sendiri dengan berbagai cara. Paling tidak ada lima cara dalam melanggengkan kepentingan dalam perspektif Bourdieu. Bourdieu menjelaskan bahwa manusia dan kelompoknya memiliki habitus yang telah terbentuk dalam jangka panjang. Habitus adalah seperangkat kebiasaan yang telah tertanam secara mendalam dalam diri seseorang dari pengalaman yang ia terima sedari awal. Dalam rangka mempertahankan habitus masing-masing, para aktor melakukan beberapa strategi. Menurut Bourdieu, terdapat lima strategi yang dapat dilakukan seseorang, yaitu (1) *Strategi Investasi biologis* berhubungan dengan usaha pelestarian keturunan dan terjaminnya transmisi kapital pada generasi berikutnya. (2) *Strategi suksesif* berhubungan dengan usaha untuk menjamin pengalihan (*transmission*) harta warisan antar generasi dengan cara yang seefektif mungkin. (3) *Strategi investasi ekonomi* berkaitan dengan pengalihan kapital ekonomi, tujuannya adalah mempertahankan dan meningkatkan akumulasi kapital yang dimiliki. (4) *Strategi edukatif* merupakan usaha suatu kelompok sosial untuk menciptakan pelaku-pelaku sosial baru yang layak dan mampu menerima warisan dari kelompok sosial tersebut. (5) *Strategi investasi simbolik* terkait dengan semua tindakan yang melestarikan dan meningkatkan kapital simbolik: pengakuan atau kehormatan dengan tujuan mereproduksi persepsi dan apresiasi yang paling sesuai demi terjaminnya legitimasi posisi mereka di dalam hirarki sosial.⁵

Era reformasi yang berlangsung sejak 1998 belum sepenuhnya mampu menanamkan kepercayaan publik atas segala hal, terutama dalam hal politik. Keinginan untuk kembali ke masa lalu, dengan kehidupan politik yang lebih tenang, masih kadang-kadang terdengar dalam perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Kepercayaan politik (kadang-kadang disebut juga *institutional trust*) mengacu pada perasaan masyarakat era baru mempunyai kepercayaan kepada institusi politik. Dengan demikian, kepercayaan dapat dilihat sebagai suatu bentuk dukungan tersebar bagi era baru dari warga era baru. Dalam hal ini, penting untuk membedakan berbagai tingkatan objek kepercayaan politik. Pertama, kepercayaan politik dapat merujuk pada perilaku politisi tertentu, khususnya yang sedang memegang kekuasaan. Tak mengherankan jenis kepercayaan ini paling mudah berubah, dan berkaitan dengan kinerja politisi dalam

⁵<http://www.labsosiologi.uni.org/wp-content/uploads/2012/10/Kurikulum-sebagai-Arena-Kontestasi-Kekuasaan.pdf>

kekuasaan, egara politik pada umumnya, dan ekonomi egara. Fluktuasi pada tingkatan kepercayaan terhadap politisi tertentu, biasanya tidak dilihat sebagai egaraatic, apabila politisi inkumben dapat diganti.⁶ Tingkatan yang kedua mengacu kepada kepercayaan terhadap institusi itu sendiri, seperti parlemen, pemerintah, atau pengadilan. Di sini asumsinya adalah bahwa kepercayaan terhadap institusi ini sangat penting bagi stabilitas egara. Bahkan jika warga egara tidak setuju dengan kebijakan yang sedang dijalankan partai atau partal-partal pemerintah, mereka dapat mengekspresikan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Penelitian survey menunjukkan bahwa kepercayaan kepada institusi adalah jauh lebih stabil daripada kepada politisi tertentu. Ketiga, dan jauh lebih abstrak, adalah kepercayaan kepada prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan politik, seperti kepercayaan kepada demokrasi. Pada sebagian besar masyarakat Barat, tingkat kepercayaan ini tetap tinggi dan stabil.⁷

Nilai-nilai demokrasi yang membutuhkan peran serta warga dalam politik merupakan salah satu pra-syarat dalam terbentuknya masyarakat demokrasi yang lebih mandiri dan maju. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana perilaku politik masyarakat saat ini, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberi gambaran utuh mengenai perilaku politik yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di samping itu, penelitian politik ini akan dilengkapi dengan pembahasan dari perspektif dakwah. Dalam konteks ini perlu dikemukakan terlebih dahulu definisi politik yang digunakan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, yaitu:

“Politik adalah hal memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat.” Internal politik adalah “mengurus persolalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan, dan dikeritik jika mereka melakukan kekeliruan.” Sedang yang dimaksud dengan eksternal politik adalah “memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya.”⁸

⁶ March Hooghe, *Budaya Politik, dalam* John T. Isiyama dan Marijke Breuning, *op.cit.* hal. 337-338, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal:48-51. Keterangan serupa juga bisa ditemukan dalam

⁷ *Ibid.* hal.338

⁸ <http://www.alhikmah.co.id/menjadi-politisi-dakwah/> dikases pada tanggal 15 Agustus 2015.

Dengan pemahaman definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa politik dan dakwah adalah dua kegiatan yang sangat terkait, dan sangat mungkin dakwah menjadi kegiatan politik, atau politik menjadi kegiatan dakwah, atau dapat disebut *two in one*. Bahwa dakwah adalah politik apabila ia berperan memahamkan masyarakat kepada hak dan kewajiban mereka. Dan bahwa politik adalah dakwah jika ia berperan mengajak masyarakat berbuat baik, memfasilitasi mereka berbuat makruf dan menutup semua pintu bagi masyarakat untuk berbuat zhalim dan dizhalimi.

Secara operasional, bahwa dakwah adalah politik dan politik adalah dakwah dapat dipahami dengan baik oleh setiap muslim apabila *pertama*, memahami universalitas Islam; *kedua*, memahami risalah penciptaan manusia; dan *ketiga*, mengetahui cara merealisasikan risalah tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga setiap muslim harus menjadi da'i sekaligus menjadi politisi. Karena itulah Hasan Al Banna mengatakan:

*"Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politisi, mempunyai pandangan jauh kedepan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya."*⁹

Dengan demikian, perpaduan antara demokrasi langsung yang ditandai dengan pemilihan langsung oleh warga dalam setiap kontestasi bidang politik dengan urgensi dakwah Islam sebagai pendampingnya menjadi suatu bahasan yang penting untuk memastikan bahwa demokrasi itu berjalan, tidak hanya sesuai dengan norma politis, namun juga selaras dengan norma Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menjadi sumber perilaku memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh?
 2. Bagaimana bentuk perilaku memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh?
 3. Apa yang bisa mengubah perilaku memilih ke arah yang lebih baik?
 4. Bagaimana dakwah Islam bisa menjadi solusi bagi perbaikan perilaku memilih warga?

⁹ Ibid.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan pelbagai masalah yang berhubungan dengan perilaku memilih di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
2. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi munculnya solusi yang bisa diimplementasikan, baik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, maupun di daerah lain yang .

Di samping itu penelitian ini akan digunakan sebagai:

1. Sumber data dalam mempelajari partisipasi politik warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
2. Salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi politik warga Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

D. Kerangka Teori

1. Otonomi Daerah dan Politik Lokal

Selama Orde Baru, asas sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai ciri dari negara kesatuan, telah mematikan demokrasi di tingkat lokal khususnya rekrutmen kepemimpinan politik lokal. Padahal menurut Benyamin Husain pembentukan desentralisasi dan pemberian kekuasaan daerah adalah untuk kepentingan masyarakat setempat. Sementara kenyataan yang menonjol adalah daerah otonom bukan saja diciptakan sekaligus subordinasi Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga merupakan perpanjangan kekuasaan Pemerintah Nasional yang berdaulat dalam kerangka Negara Kesatuan. Sebaliknya, desentralisasi tetap diupayakan untuk mengurangi berbagai masalah dan ketegangan yang timbul dari implementasi asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi menurut B.C Smith adalah:

"....an approaching process to local government provided that there is a delegation of authority to subordinate government and power-sharing government to the regions, this can be seen as a strategy to reduce centralization of power in addition to increasing the democratization of local politics".¹⁰

¹⁰ Lihat B.C. Smith, *Decentralization : The Territorial Dimension of The State*, Manchester : Allen & Unwin Inc. 1985, hal 1.

(....suatu proses pendekatan terhadap pemerintah daerah, dengan syarat yang mendelegasikan kekuasaan kepada Pemerintah (daerah) sebagai subordinasi pemerintah pusat dan pembaglan kekuasaan kepada daerah, hal ini dapat dilihat sebagai strategi untuk memperkecil ruang sentralisasi kekuasaan disamping untuk mendorong kemajuan demokratisasi politik lokal.)

Berbagai peraturan telah dibuat untuk memberikan berbagai wewenang kepada daerah melalui desentralisasi dengan maksud untuk mengurangi dominasi pemerintah dan elit politik Pusat. Kewenangan itu untuk memperkuat fungsi dan peran infra-struktur politik dan suprastruktur politik lokal, seperti eksekutif daerah (gubernur-walikota-bupati), legislatif daerah (DPRD), partai politik, kelompok kepentingan (*interest group*), media massa dan elit politik seperti dalam rekrutmen kepemimpinan politik lokal. Sebab, salah satu dasar historisnya adalah munculnya berbagai masalah dalam hubungan pusat-daerah berkaitan dengan rekrutmen kepemimpinan politik lokal.

Penegasan terhadap munculnya berbagai masalah hubungan pusat-daerah sebagaimana dapat dicermati dari penjelasan Denis A. Rondinelli. Menurut Rondinelli, politik sentralistik lebih membawa pada kondisi yang anti (kurang) demokrasi.¹¹ Rondinelli dalam bukunya *Decentralization, Development and Directions*, menjelaskan :

*"The Low levels of political support at the center in most Third World countries have also undermined decentralization policies"*¹²

(Lemahnya tingkat *dukungan* politik pemerintah pusat (negara) pada kebanyakan negara dunia ketiga juga melemahkan politik desentralisasi)

Kondisi ini juga sebagaimana dijelaskan oleh John Stewart dalam artikel *Democracy and Local Government* yang menekankan proses demokrasi dan demokratisasi di tingkat lokal sangat penting untuk menanggulangi persoalan mengenai terlalu kuatnya sentralisasi dan menjaga demokrasi yang berkualitas. Untuk mendukung proses otonomi daerah dan demokrasi lokal, dalam tulisan menjelaskan :

¹¹ Lihat Fadilla Putra, *Devolusi: Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 6.

¹² Dennis A. Rondinelli and G. Shabbir Shema, *Decentralization, Development and Directions*, Ch. 10. Sage Publication, Beverly Hills, California, hal. 305.

"Strengthening local government is advocated as a necessary step and overcoming the problems of and over-centralised trial listed state. The case for strengthening local government past not only upon the problems to be overcome, but on the positive contribution that local authorities can make the quality of democracy. It has long been recognised that local authorities enable for more people to participate in government ... one of the main consequences was political education particularly for what he regarded as the lower classes"¹³

(Memperkuat sistem pemerintahan daerah dianjurkan sebagai langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah kebijakan negara yang terlalu sentralistik. Kasus ini untuk memperkuat pemerintahan daerah bukan hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, tetapi berkontribusi positif agar pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Telah diakui bahwa otoritas-otoritas lokal memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (daerah) ... salah satu konsekuensi utama adalah pendidikan politik terutama kepada masyarakat kelas bawah).

Untuk itu dalam proses demokratisasi politik lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditujukan untuk mewujudkan partisipasi politik warga, baik dalam proses politik khususnya pada proses konversi atau formulasi suatu kebijakan politik, juga dalam hal implementasi kebijakan publik itu.

Berdasarkan konsepsi pemikiran tersebut, signifikansi teori otonomi daerah Rondinelli dan politik lokal Stewart dapat menjelaskan dinamika politik lokal melalui pemilu lokal yang melahirkan pemimpin lokal yang representatif, sehingga pemerintahan daerah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan proses demokratisasi daerah dan mengurangi pemusatan kekuasaan oleh pemerintah pusat.

2. Elit Politik

Sejumlah studi tentang elit memusatkan perhatian pada peranan elit di negara-negara sedang membangun dan di negara maju. Peranan elit di negara-negara sedang membangun dan di negara-negara maju berbeda-beda. Dalam beberapa masyarakat tradisional, elit penguasa telah memberikan perlawanan yang kuat terhadap perubahan. Di negara yang sedang melaksanakan

¹³ John Stewart, *Democracy and Local Government*, in Paul Hirt and Sunil Khilnani (eds), *Reinventing Democracy*, Oxford, Blackwell Publishers, 1996, hal. 39.

modernisasi, ditemukan elit tertentu yang sangat aktif memimpin pembangunan.

Dalam studi ini, teori elit yang digunakan adalah teori elit politik dari Suzanne Keller untuk menjelaskan keterlibatan elit politik secara personal dalam lapangan politik. Juga digunakan teori elit politik Gaetano Mosca untuk membantu menganalisis posisi elit politik dalam organisasi. Keller menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan dalam tipe apapun pasti terdapat sekelompok kecil orang yang mampu mengendalikan masyarakat yang lainnya demi kepentingan kelompok kecil tersebut.

Keller selanjutnya mengemukakan bahwa :

"tidak semua elit berperan dan mempunyai suatu dampak sosial yang umum dan bertahan, hanya kelompok-kelompok tertentu saja di mana keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya mempunyai akibat-akibat penting dan menentukan untuk kebanyakan anggota masyarakat. Kelompok-kelompok ini disebut sebagai elit penentu yang terdiri dari para pemimpin politik, ekonomi dan militer, para pemimpin moral (elit agama), budayawan (elit budaya), dan kaum intelektual (elit ilmuwan).¹⁴

3. Primordialisme dan Kelompok Etnik

a. Primordialisme

Salah satu masalah politik domestik yang dihadapi di negara-negara Asia dan Afrika seperti Indonesia, Malaysia, Birma, India, Lebanon, Maroko, dan Nigeria adalah konflik politik yang bersifat primordial. Perbedaan kultural itu adalah berkaitan dengan adat istiadat dan wilayah yang tersebar sebagaimana yang diamati oleh Geertz. Dalam pandangan Geertz, *Indonesia, Malaysia, Burma, India, Marocco and Nigeria, culturally distinct and geographically scattered, are as appropriate subjects as any for this type of plying survey of divided nations en route -- hypothesis -- to unity.*¹⁵ (Indonesia, Malaysia, Burma, India, Maroko, dan Nigeria, yang memiliki adat yang berbeda-beda dan terpisah secara geografis,

¹⁴ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1995, hal. 28.

¹⁵ Clifford Geertz (eds), *Old Societies and New State: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York, The Free Press, 1963, page.130

sebagai subyek penelitian yang tepat untuk melakukan studi tentang perbedaan setiap bangsa ke arah persatuan).

Menurut Geertz, konflik politik di negara-negara berkembang disebabkan oleh perbedaan dan pertentangan yang didasarkan pada ikatan-ikatan primordial.¹⁶ Ikatan primordial menurut Geertz adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai *given* yang disebabkan karena hubungan darah atau persamaan dalam agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Tentang primordial ini, Geertz menjelaskan :

... a primordial attachment is meant one that stems from the "givens"- or, more precisely, as culture is inevitably involved in such matters, the assumed "givens" - of social existence: immediate contiguity and kin connection mainly, but beyond them the givenness that stems from being born into a particular religious community, speaking a particular language, or even a dialect of a language, and following particular social practices. These congruities of blood, speech, custom, and so on, are seen to have an ineffable, and at times overpowering, coerciveness in and of them selves.

(... suatu ikatan primordial diartikan berasal dari budaya alami atau lebih tepatnya sebagai budaya yang telah ada dan terlibat dalam persoalan-persoalan tersebut -- dengan keberadaan sosial : terutama hubungan langsung dan hubungan kekerabatan, tetapi diluar itu keberadaan yang berasal dari satu keturunan menjadi masyarakat dengan agama tertentu, berbicara dengan bahasa tertentu atau pun dengan dialek tertentu serta mengikuti tradisi sosial tertentu. Persamaan darah, ucapan, kebiasaan dan lain sebagainya secara jelas terlihat unsur pemaksaan dan dianggap memiliki berlebihan pada diri mereka.)

Oleh karena itu, ikatan primordial menurut Geertz bukan merupakan hasil dari suatu hubungan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain.¹⁷ Rauf (2000:62-64) menjelaskan secara lengkap pandangan Geertz tentang primordialisme, seperti berikut : Kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama.

¹⁶ Lihat Clifford Geertz, *Old Societies and New State* yang diterjemahkan dalam *Ikatan-ikatan Primordial dan Politik di Negara-negara Baru* dalam Juwono Sudarsono (ed), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta, Gramedia, 1981, hal 1-14. Lihat juga Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*, Jakarta, Dirjen Dikti Depdiknas, 2000, hal 119.

¹⁷ Nilai-nilai *given* adalah nilai-nilai yang telah terbentuk dan diterima oleh individu apa adanya atau campur tangan individu yang bersangkutan sehingga bersifat alami. (lihat Geertz, 1963:109-110; Sudarsono, 1981:3).

Persamaan ras atau suku akan menghasilkan persamaan-persamaan kultural lainnya seperti persamaan bahasa, adat istiadat dan kedaerahan. Orang-orang yang berasal dari suatu suku tertentu, umpamanya, akan mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama. Nilai primordial yang terkandung dalam agama sedikit berbeda dengan ras/suku. Seseorang tidak bisa memilih agama dari keluarga di mana ia dilahirkan, tapi seorang pemeluk agama tertentu bisa saja berpindah agama sehingga ia beralih atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial atas dasar agama tertentu ke kelompok primordial atas dasar agama yang lain. Dalam hal suku atau ras, seseorang tentu saja tidak berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai kelompok ras atau suku tertentu melekat pada dirinya meskipun ia tidak mau mengakuinya.

Kedua ikatan primordial itu membentuk sentimen dan loyalitas yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara sesama anggota kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama. Semua persamaan itu membuat mereka bersedia membela kelompok mereka dengan pengorbanan apa pun. Dalam primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran agama yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apa pun.

Menurut Rauf (2000:69), salah satu persoalan utama dalam politik adalah bagaimana memperbesar dukungan dari rakyat. Ikatan primordial itu merupakan alat yang ampuh untuk menarik dukungan dari kelompok primordial. Mereka lebih tertarik pada usaha-usaha untuk membela kepentingan primordial, daripada usaha-usaha untuk kepentingan politik. Namun kenyataannya kedua hal tersebut sulit dibedakan sehingga mudah dimanfaatkan oleh pemimpin politik.

b. Kelompok Etnik

Di Indonesia istilah etnik hanya digunakan pada suku-suku tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia, namun telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat, serta tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka yang

dikerjakan, dan atau karena secara fisik benar-benar khas.¹⁸ Misalnya etnik Cina, Arab, Portugis. Namun perkembangan kemudian, istilah etnik juga dipakai sebagai sinonim dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia, misalnya etnik Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Minang, Batak, dan sebagainya. Istilah kelompok etnik sendiri merujuk pada pengertian kelompok orang-orang, sedangkan etnik merujuk pada orang-orang dalam kelompok.

Etnik digambarkan oleh Anthony D. Smith (1995:57) adalah :

*In Ethnies are in turn defined named unit of population with common ancestry myths and historical memories, elements of shared culture, some link with a historic territory and same measure of solidarity, at least among their elit.*¹⁹

(Pada umumnya, etnik merupakan nama-nama unit tertentu dari unit-unit populasi dengan mitos-mitos warisan biasa serta ingatan-ingatan sejarah, dan elemen-elemen dari budaya, sejumlah hubungan dengan wilayah historis dan ukuran-ukuran solidaritas tersebut, sekurang-kurangnya terjadi di antara elit mereka).

Dalam ilmu sosial, yang pertama yang membawa istilah kelompok etnik ke dalam studi sosial adalah sosiolog Jerman, Max Weber. Weber mendefinisikan kelompok etnik sebagai,

... interval group of human which entertain subjective belief through their common ancestors because of they have either or both same customs and physical types or even as result of colonization and migration memories.

(... sekelompok manusia tertentu yang secara subyektif memiliki kesamaan keyakinan dari nenek moyang karena adanya kesamaan tipe-tipe fisik atau kebiasaan atau keduanya, atau karena memiliki sejarah akibat penjajahan dan migrasi).²⁰

¹⁸ Istilah etnik (*ethnic*) diperkenalkan sejak abad ke-14. Istilah etnisitas dan kelompok etnik berasal dari kata Yunani *ethnos*, diterjemahkan sebagai bangsa, dalam arti yang lebih modern muncul pada pertengahan abad ke-19 dan mengekspresikan gagasan orang atau negara. Lihat Thi E Tonkin, M. McDonald and M. Chapman, *History and Ethnicity* (London, 1989:11-17); J. Hutchinson & A.D. Smith (eds), *Oxford Readers: Ethnicity* (Oxford, 1996:18-24). Di Inggris misalnya, pada tahun 1977, Wallman mencatat bahwa etnik lebih populer dengan ras, hanya menurut mereka kurang tepat, dan dengan nilai beban lebih ringan. Sebaliknya di Amerika Utara, ras paling sering digunakan yang berarti warna, dan suku. Suku mengandung pengertian keturunan imigran baru dari negara-negara non berbahasa Inggris. Sedangkan di Inggris tidak ada istilah suku, yang ada hanya hubungan etnik. (lihat Wallman S, *Ethnicity Research in Britain, Current Anthropology*, Vol. 18, no. 33, 1977, hal. 531-532).

¹⁹ Lihat juga M.D. La Ode, *Etnik Cina di Era Reformasi, Studi Kasus Keterlibatan Etnik Cina di Indonesia dalam Politik di Kota Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Barat 1998-2008*, Jakarta, FISIP UI (Disertasi, tidak diterbitkan), 2011, hal. 9-10.

²⁰ Kelompok etnik menurut Don Handelman sebagaimana dikutip oleh H.A.R. Tilar (2007:05) adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau memiliki satu nenek moyang, mempunyai pengalaman

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan etnik di Kota Jambi adalah suku-suku tertentu yang dianggap telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat di wilayah Kota Jambi, seperti etnik Melayu Jambi, Jawa, Sunda, Bugis, Minang, dan Tionghoa lainnya.

4. Koalisi Multi Etnik

Teori Koalisi Multi Etnik Donal L. Horowitz adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa beberapa etnik dengan kondisi tertentu bisa melakukan konsolidasi untuk menentukan sebuah tujuan atau keputusan bersama. Teori ini digunakan untuk memahami peran politik etnik Melayu Jambi dengan melihat hubungan antar etnis yang kelihatan lebih harmonis, karena etnis mayoritas, Melayu Jambi mengambil peran pasif dalam politik yang terlihat tidak memiliki ambisi besar untuk memegang kekuasaan Walikota-Wakil Walikota Jambi secara langsung.

E. Metode Penelitian

Dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya: lokasi penelitian, waktu, dan sumber dana, maka periset menerapkan metode campuran dalam melaksanakan riset. Metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pertama periset melakukan studi awal (*preliminary research*) dengan metode kualitatif. Pada tahap ini periset mempelajari beberapa sumber data yang berhubungan dengan partisipasi politik warga Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Umum legislative dan presiden pada tahun 2014 yang lalu. Data itu diperoleh dari hasil evaluasi partisipasi pemilih di Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada dua pemilu tersebut dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang diyakini memiliki kompetensi dalam memberikan jawaban terhadap masalah seputar perilaku memilih warga;
2. Hasil studi awal yang menunjukkan bahwa secara garis besar perilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh factor

sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya di dalam satu atau beberapa elemen yang simbolik, seperti keluarga, ciri-ciri fisik, afiliasi agama dan kepercayaan, bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut di atas. Pada dasarnya di dalam kelompok tersebut terdapat ikatan antar anggota sebagai suatu kelompok.

internal dan eksternal yang jika tidak dikelola dengan baik akan cenderung memberikan pilihan yang salah ataupun pilihan yang dipengaruhi oleh unsur materialistis yang berbaya bagi kehidupan demokrasi di daerah ini. Alih-alih pemilihan langsung bisa menjadi salah satu pendorong berkembangnya demokrasi, justru akan memperlemah demokrasi itu sendiri.

3. Berikut daftar pengguna hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu di Kabupaten Kerinci:

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Era Reformasi di Indonesia yang sudah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun, telah menimbulkan dampak signifikan bagi kehidupan politik di Indonesia. Era politik sentralistik yang dipraktikkan oleh pemerintah Orde Baru, di bawah kendali Soeharto dari tahun 1966, perlahan berakhir pada tahun 1998. Politik Indonesia sejak saat itu, praktis berubah, yang salah satu dampak yang paling terasa adalah terlibatnya warga secara langsung dalam banyak model pemilihan politik yang tidak pernah ditemui sebelumnya. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi salah satu pintu utama menuju pada terlibatnya warga dalam pemilihan langsung.

Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, keterlibatan langsung warga dalam setiap pemilihan politik telah membawa perubahan besar. Tidak saja bagi meningkatnya partisipasi warga secara langsung dalam politik, namun juga beberapa eksekusi negatif terhadap perilaku memilih warga. Di antara yang paling menonjol adalah pola pilihan yang sangat dipengaruhi oleh unsur primordialisme dan penggunaan uang sebagai imbalan dalam pemilihan.

Perilaku politik warga dalam melakukan pilihan seperti yang tersebut di atas, alih-alih mendukung berkembangnya demokrasi ke arah yang lebih baik, justru menghancurkan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh demokrasi. Sehingga perlu upaya yang cukup serius untuk mengantisipasi berkembangnya perilaku politik yang telah berkembang, paling tidak sejak proses pemilihan langsung, tahun 2004, dimulai.

Namun, di tengah-tengah masalah yang ditemui di atas, tetap ada peluang bagi pihak yang ingin memperbaiki kualitas perilaku memilih warga. Responden meyakini bahwa himbauan para tokoh masyarakat di masing-masing daerah tetap bisa memberi pengaruh positif bagi perilaku memilih warga. Bahkan, media komunikasi melalui tempat-tempat ibadah dan acara-acara keagamaan dianggap

efektif untuk memperbaiki perilaku memilih warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

B. Rekomendasi

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang bisa diajukan guna memberi pertimbangan bagi upaya meningkatkan kualitas perilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

1. Perlu dilakukan upaya yang cukup serius dalam mendata warga agar tidak terjadi pemilih ganda. Hal ini bisa dengan mencocokkan data pemilih dari daerah tertentu yang menetap secara tidak permanen di tempat lain, baik karena memiliki kebun/ ladang, maupun karena ada kegiatan lainnya. Misal dari Kecamatan Bukit Kerman dan Kecamatan Air Hangat Timur. Ada banyak warga Air Hangat Timur yang memiliki kebun/ ladang/ tempat usaha di Kecamatan Bukit Kerman. Hal serupa juga terjadi dengan warga di Kecamatan Siulak dengan Kayu Aro. Ada banyak warga Siulak yang memiliki ladang di Kayu Aro yang boleh jadi terdaftar lebih dari satu kali. Untuk pendataan pemilih *by name* perlu dilengkapi dengan identifikasi nomor induk kependudukan, atau kode lain yang memastikan bahwa pemilih tidak bisa terdaftar lebih dari satu kali;
2. Meskipun warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah cukup antusias dalam mengikuti kegiatan politik, ajakan tokoh masyarakat masih memiliki pengaruh cukup tinggi dalam memantapkan keikutsertaan masyarakat Kerinci dalam politik. Ajakan tersebut, berdasarkan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Kerinci bisa saja dilakukan dalam pengajian-pengajian rutin warga; pengumuman melalui corong mushalla dan masjid. Sebaiknya intensitas pengumuman dalam mengajak warga ditingkatkan, terutama menjelang kegiatan pemilihan;
3. Perlu kewaspadaan terhadap pemilih apatis. Terlihat cukup jelas, meskipun jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sedikit,

namun alasan mereka yang sudah tidak bisa percaya pada rezim politik, dikhawatirkan memiliki dampak besar dalam memengaruhi pemilih lain untuk tidak berpartisipasi dalam politik. Untuk itu, materi sosialisasi politik perlu diperluas dengan memasukkan unsur yang bisa meyakinkan pemilih bahwa politik adalah satu entitas utama yang bisa berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

4. Perlu kewaspadaan cukup tinggi dalam membatasi politik uang. Meskipun sulit dideteksi dan dibatasi, politik uang bisa saja diminimalisir eksekusinya dengan memberi pertimbangan logis agar pemilih tetap mengedepankan rasionalitas sebagai pertimbangan dalam melakukan pilihan.
5. Media dakwah melalui acara-acara keagamaan serta pemanfaatan tempat ibadah bisa menjadi wadah efektif dalam meningkatkan kualitas prilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Demikian laporan hasil penelitian ini, semoga bisa menjadi sumber informasi yang berguna bagi peningkatan kualitas prilaku memilih warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh khususnya, dan warga Negara Republik Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Geertz, Clifford (eds), *Old Societies and New State: The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York, The Free Press, 1963.
- Habibie, Baharudin Jusuf, *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta : Pustaka Gramedia Utama, 2005.
- Hooghe, March, Budaya Politik, dalam John T. Isiyama dan Marijke Breuning, *Teori Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. Nordholt, Henk Sculte dan Gerry van Klinken (editor), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- La Ode, M.D., *Etnik Cina di Era Reformasi, Studi Kasus Keterlibatan Etnik Cina di Indonesia dalam Politik di Kota Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Barat 1998-2008*, Jakarta, FISIP UI (Disertasi, tidak diterbitkan), 2011
- Piliang, Yasar Amir (kata pengantar) dalam Arief Adityawan S, *Propaganda Pemimpin Politik Indonesia: Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Putra, Fadilla, *Devolusi: Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1987
- Rondinelli, Dennis A. and G. Shabbir Shema, *Decentralization, Development and Directions*, Ch. 10. Sage Publication, Beverly Hills, California, 1993
- Smith, B.C., *Decentralization : The Territorial Dimension of The State*, Manchester : Allen & Unwin Inc. 1985.
- Stewart, John, *Democracy and Local Government*, in Paul Hirt and Sunil Khilnani (eds), *Reinventing Democracy*, Oxford, Blackwell Publishers, 1996.
- Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2007 website Bappenas www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9663/1792/ diakses pada 09 Desember 2014
- Tonkin, Thi E, M. McDonald and M. Chapman, *History and Ethnicity*, Oxford, 1996.

Jurnal

- Wallman S, *Ethnicity Research in Britain*, Current Anthropology, Vol. 18, no. 33, 1977

Website

<http://www.labsosiologiunj.org/wp-content/uploads/2012/10/Kurikulum-sebagai-Arena-Kontestasi-Kekuasaan.pdf>

<http://www.alhikmah.co.id/menjadi-politisi-dakwah/> dikases pada tanggal 15 Agustus 2015.

http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kpsungai_penuh/profil-kota-sungai-penuh-dan-kabupaten-kerinci-jambi, 26 September 2014

<http://www.incung.com/2014/11/sekilas-perjuangan-pembentukan.html>